



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI
UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SISWANTANA PUTRI RACHMATIKA
2. Jabatan : PENGOLAH DATA PERKARA DAN PUTUSAN
3. NHK : 142264

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.710.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/220 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 1.140.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 131 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HIBAH TANPA AKTA Rp. 570.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 92.700.000

1. MOTOR, YAMAHA JUPITER SEPEDA MOTOR Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000
2. MOBIL, TOYOTA AVANZA MINIBUS Tahun 2010, HIBAH TANPA AKTA Rp. 80.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 11.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 78.393.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 19.177.317

F. HARTA LAINNYA Rp. 80.200.000

Sub Total Rp. 1.980.470.317

III. HUTANG Rp. 204.228.237

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.776.242.080

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.